

SEMNASIA**(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)**Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten**Kegiatan Ketahanan Pangan Hewani Dan Nabati Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat****Dian Mulyantara dan Arif Nugroho**

Program Studi Pascasarjana Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

e-mail : mulyantaradian@gmail.com.

Abstrak

Kegiatan Ketahanan pangan hewani dan nabati desa merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mendukung program peningkatan ketahanan pangan Desa yang menjadi program strategis Pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisa bagaimana implementasi program ketahanan pangan hewani dan nabati desa yang bersumber dari dana APBDes yang dilaksanakan desa se-kecamatan cileles serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini mengkaji secara mendalam berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edward III dimana terdapat empat hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Lokasi penelitian dilaksanakan di desa yang berada dikecamatan cileles. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program ketahanan pangan hewani dan nabati desa yang dilaksanakan belum optimal. Tujuan program dan kegiatan ini adalah untuk memotivasi masyarakat agar memanfaatkan lahan sebagai sumber pangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dilihat dari dimensi komunikasi pada indikator transmisi dan dimensi struktur birokrasi pada indikator Standard operating procedures (SOPs) menjadi penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut. Faktor pendukung dalam implementasi kegiatan ketahanan pangan desa ini antara lain adalah dimensi sumber daya dan disposisi yang telah berjalan dengan baik. Dimensi komunikasi hanya terdapat dua indikator saja yaitu kejelasan dan konsistensi yang telah berjalan dengan baik dan dimensi struktur birokrasi dengan indikator fragmentasi saja yang telah terlaksana dengan baik. Faktor penghambat dalam implementasi kegiatan ketahanan pangan desa ini antara lain adalah indikator lainnya pada dimensi komunikasi yaitu transmisi/penyaluran komunikasi dan indikator lainnya pada dimensi struktur birokrasi yaitu Standart Operating Procedures (SOPs). Rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa selaku Implementor Agency hendaknya dapat melibatkan aktor lainnya dalam implementasi kegiatan Ketahanan pangan hewani dan nabati desa seperti kecamatan, BPTP Lebak, organisasi kemasyarakatan/NGO, asosiasi-asosiasi yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan infrastruktur hingga pihak swasta dalam mensosialisasikan program dan kegiatan sehingga dapat berjalan lebih masif. Desa sebaiknya menyusun SOPs dan menyusun peta FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) untuk melihat daerah rentan pangan agar kelompok penerima bantuan lebih tepat sasaran.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Kegiatan Ketahanan pangan hewani dan nabati desa.

Implementation of village animal and vegetable food security programs to improve the community's economy***Abstract***

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

The village animal and vegetable food management activities are one of the Government's efforts to support the village's food resilience improvement programme, which is a strategic government programme. The purpose of this research is to explain and analyze how the implementation of the village animal and vegetable food resilience program is sourced from the APBDes fund implemented by the village of cileles as well as to identify the supporting and inhibiting factors. This research belongs to the type of qualitative research. This study explores in depth based on the theory put forward by Edward III that there are four things that greatly influence the success of a policy implementation: communication, resources, disposal and bureaucratic structure. The location of the research was carried out in the village which is in the custody of cileles. Data collection is done through interviews, documentation and observations. Based on the results of the research, the implementation of the village animal and vegetable food sustainability program is not optimal. The aim of these programmes and activities is to motivate people to use land as a source of food and improve their economies. Seeing from the communication dimension on the transmission indicator and the bureaucratic structure dimension of the Standard operating procedures (SOPs) indicator are the reasons for the unoptimal implementation of the policy. The supporting factors in the implementation of food security activities in this village are among other things the dimensions of resources and disposal that have gone well. The communication dimension has only two indicators: clarity and consistency that has gone well and the dimension of bureaucratic structures with indicators of fragmentation only that have been implemented well. (SOPs). The recommendation that can be given in this study is that the Government of the Village as the Implementor Agency should be able to involve other actors in the implementation of the activities of Animal Food Resistance and village care such as recovery, BPTP Lebak, social/NGO organizations, associations that operate in the agriculture, planting, fishing and infrastructure sectors to the private parties in socializing programmes and activities so that they can run more massively. Villages should build SOPs and build a Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) map to see food-sensitive areas so that aid recipients are more targeted.

Keywords: Implementation of policy, Rural animal and vegetable food resilience activities.

A. PENDAHULUAN

Program Ketahanan Pangan dan hewani yang dilaksanakan diseluruh Desa se-Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 dengan prioritas penggunaan Dana Desa terdiri dari 2 Katagori, yaitu :

1. diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa,
2. diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa,
 - program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, dan
 - mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

sehingga risiko rawan pangan dan gizi buruk yang tersebar di seluruh Indonesia dapat teridentifikasi. Melalui program Ketahanan

Pangan hewani dan nabati desa, diharapkan masyarakat desa mampu memproduksi dan memenuhi produk-produk pangan yang dibutuhkan dengan didukung unsur-unsur sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, sarana dan prasarana, sehingga dapat mengurangi risiko kerawanan pangan dan dapat menciptakan ketahanan pangan di dalam lingkup desa. Adapun tujuan dari program tersebut adalah untuk (1). Penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan ekonomi produktif; (2). Meningkatkan pengembangan perekonomian masyarakat kearah yang lebih baik; Adapun pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan di kabupaten Lebak sangat strategis karena manfaat yang akan didapat oleh masyarakat antara lain : (1) Terciptanya lapangan kerja yang dapat menambah penghasilan masyarakat; (2). Meningkatnya pemanfaatan sumber-sumber ekonomi masyarakat; (3). Terbangunnya rasa solidaritas kegotongroyongan yang tinggi dimasyarakat; (4). Meningkatkan daya beli

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

masyarakat dan terciptanya perputaran keuangan di Desa; (5). Mencegah masyarakat desa berurbanisasi ke kota-kota besar.

Sasaran kegiatan ketahanan pangan hewani dan nabati desa dikecamatan Cileles adalah Masyarakat/Kelompok desa yang terdiri dari dua belas (12) desa untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat melalui peningkatan perekonomian Masyarakat dan terciptanya lapangan kerja melalui kegiatan ekonomi produktif..

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 34 ayat (2), bahwa Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

Kegiatan ketahanan pangan dalam hal teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa mengacu kepada Peraturan Bupati nomor 8 tahun 2020, Ketahanan Pangan di tingkat Desa adalah pelaksana yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Ketahanan Pangan di tingkat Desa, yaitu terdiri (1) Kepala Desa; (2) Perangkat Desa; (3) Tim Pelaksana Kegiatan; Badan Usaha Milik Desa; (4) Kelompok Masyarakat; (5) Penyedia, dan Pelaksanaan kegiatan Ketahanan Pangan yang menggunakan Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sesuai Keputusan Menteri Desa No. 40 tahun 2021 Tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat bahwa Desa mendapatkan pendampingan dari tenaga pendamping profesional yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, serta untuk Pembina kegiatan pangan, yaitu (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD); (2) Dinas Pertanian; (3) Dinas Perikanan; (4) Dinas Peternakan; (5) Dinas Ketahanan Pangan; (6) Camat selaku Pembina pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan yang dibantu oleh kasi Ekonomi Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Untuk program ketahanan pangan dan hewani itu sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah

termasuk dalam kategori prioritas yang diarahkan bagian program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dalam rangka untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan (SDG's ke-2), yang kegiatannya meliputi :

- pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan,
- pembangunan lumbung pangan Desa,
- pengolahan pasca panen, dan
- penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani di Kecamatan Cileles dilaksanakan oleh seluruh desa diwilayah Kecamatan Cileles, yaitu terdiri dari 12 Desa, Adapun Jenis program yang dilaksanakan yaitu :

Tabel : 1

No	Kegiatan	Jenis Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Peternakan, Perikanan, Pertanian.	Hewani dan Nabati	Bibit, pupuk, obat-obatan, pakan, Mesin Air, traktor, sumur bor, genset dll
2.	Sarana Prasarana	Infrastruktur Desa	Jalan Usaha Tani dan Irigasi

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Edward, implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada diantara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (output, outcome). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi dan lain-lain".

Program Ketahanan Pangan Hewani dan Nabati Desa bertujuan untuk Penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan ekonomi produktif; Meningkatkan pengembangan perekonomian masyarakat kearah yang lebih baik; melalui kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan pembuatan/perbaikan Jalan Usaha Tani

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

(JUT), serta untuk menambah pendapatan keluarga.

Menurut Edward III terdapat empat hal yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, berikut pembahasan terkait implementasi kegiatan Ketahanan pangan hewani dan nabati desa yang dilihat dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Dimensi komunikasi memiliki peran dan fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Transmisi
- 2) Kejelasan
- 3) Konsistensi

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan yang sangat penting dalam implementasi kegiatan Ketahanan pangan hewani dan nabati desa ini, sebagaimana dijelaskan dalam Riant Nugroho bahwa sumber daya adalah menyangkut ketersediaan khususnya kompetensi sumber daya manusia dan kapabilitas untuk melakukan kebijakan secara efektif. Empat indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya dapat berjalan dengan baik, yaitu :

- 1) Staf
- 2) Informasi
- 3) Wewenang
- 4) Fasilitas

3. Disposisi

Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki

kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Indikator yang diperhatikan dalam melihat faktor disposisi ini adalah:

- 1) Pengangkatan birokrat
- 2) Insentif

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III yaitu mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ia menekankan perlu adanya *Standart Operating Procedures* (SOPs) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana dan adanya fragmentasi berupa penyebaran tanggung jawab atau aktivitas pegawai. Terdapat dua indikator yang dapat menaikkan kinerja struktur birokrasi yaitu:

- 1) *Standart Operating Procedures* (SOPs)
- 2) Fragmentasi

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Diharapkan dengan adanya program ketahanan pangan hewani dan nabati desa ini dapat memotivasi masyarakat agar dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada guna mencukupi kebutuhan pangan keluarga dan desa sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat serta dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan urbanisasi ke kota.

REFERENSI

- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian Kebijakan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno. 2017 *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.

Beragam Pers.

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

Wahab, S.A. 2017. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wasistiono, Sadu. 2017. *Perkembangan Ilmu Pemerintahan Dari Klasik Sampai Ke Kontemporer*. Jatinangor, Bandung: IPDN Press.

Wasistiono, Sadu and Petrus Polyando. 2017. *Politik Desentralisasi Di Indonesia*. Edisi revisi yang diperluas. Jatinangor, Sumedang: IPDN Press.

B. Jurnal

Alfia, L. (2016). Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Studi pada Dinas Pertanian Kabupaten Blitar). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Universitas Brawijaya*, 2(3), 81221.

Halimah, M., & Susanti, E. (2017). Organizational Capacity of the City Government of Cimahi in the Implementation of the Improvement of Community Food Diversification and Security Program. *Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol. 6, no. 1, pp.418-422, January 2017

Meigawati, D., & Melawati, M. (2017). Implementasi Kebijakan Himbauan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Muklis, M. Rachmadi, dan Muslim. 2019. Sektor ekonomi potensial di Kota . *Jurnal Al-Iqtishad* 15, no. 1:48

C. Aturan dan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 dengan prioritas penggunaan dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2021 dengan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 21/KPTS/RC.110/J/02/2019, Tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2019.

Kota Dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik Kota . Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 13 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Pangan.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 19/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.

Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi.

Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.